

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 7/ /VI.01/HK/2018

#### **TENTANG**

### PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SAI BUMI RUWA JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

### GUBERNUR LAMPUNG.

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, telah dibuat Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (SIMNANGKIS SABURAI) berbasis online yang berisi data sasaran 40 % penduduk miskin terendah di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa agar aplikasi SIMNANGKIS tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan tenaga operator pada masing-masing Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran program penanggulangan kemiskinan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf b di atas, perlu menunjuk Tenaga Operator Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (SIMNANGKIS SABURAI);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA **INFORMASI OPERATOR** SISTEM **MANAJEMEN** PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SIMNANGKIS) PROVINSI **LAMPUNG TAHUN 2018.** 

KESATU

Menunjuk Tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa (SIMNANGKIS SABURAI) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (SIMNANGKIS SABURAI) Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukam inventarisir dan pemetaan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan intervensi sasaran program yang telah dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. menginput data intervensi program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. bertanggung jawab terhadap hasil penginputan data intervensi program dan melaporkannya kepada Kepala masing-masing;
  - d. melaporkan hasil penginputan data intervensi program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Sekretaris TKPK Provinsi Lampung.

**KETIGA** 

: Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait.

**KELIMA** 

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 19-1-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

### MERIDHO MEARDO

#### Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/71 /VI.01/HK 2018 TANGGAL: 9-1- 2018

## DAFTAR NAMA TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SAI BUMI RUWA JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

NO	NAMA INSTANSI	NAMA OPERATOR
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung	Asyil Aripatriansah, S.I.P (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung)
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Deis Armania Pratiningtiyas. S. Kom (Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
3.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	<ol> <li>Noviani, SKM, M.Epid (Kepala Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung);</li> <li>Ive Maryani, Amd.G (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)</li> </ol>
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	<ol> <li>Vincentius Inri, S.T. (Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)</li> <li>Mira Insania Tari, S.T. (Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)</li> </ol>
5.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Musthofa, SE (Pelaksana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung);      Aris Munandar, SH (Pelaksana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	<ol> <li>Asmidar, SE, MM (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung);</li> <li>Zuhriani (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)</li> </ol>
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Pemberdayaan Perempuan dan
8.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Provinsi Lampung	1) Ari Setyawan, S.E. (Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Provinsi Lampung);

		2) Dedi Prasetyo Hartanto, S.E. (Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung)
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	<ol> <li>Arif Kurniawan Hadisaputra, S.Pi., M.I.L (Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung);</li> <li>Rika Yuniati, S.E., M.M (Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)</li> </ol>
10.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Amalia Rizkiyanti, S.Si, MM (Kasubbag Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
		2) Bellin Anastasia (Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
11.	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	Eka Yantami Aquan, S.T. (Pelaksana pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung)
12.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung	<ol> <li>Yayan Makmun Midyana, A.Md (Pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung);</li> <li>Saptadi Eko Mugroho (Pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung)</li> </ol>
13.	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Tri Vera Rianti, S.E. (Pelaksana pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung)
14.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	<ol> <li>Abu Mansyur, S.Sos (Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung);</li> <li>Indah Isana, SP (Pelaksana pada Dinas</li> </ol>
		Ketahanan Pangan Provinsi Lampung)
15.	Dinas Ketuhanan Provinsi Lampung	1) Yulius Ari Wikarta, S.Hut (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung);
		2) Yolanda Anastatica, S.Hut (Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
16.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Abdul Manap Seko (Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG.** 

M. ARADHO FICARDO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 71 /VI.01/HK 2018 TANGGAL : 'O - 1 - 2018

### SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SAI BUMI RUWA JURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

I. Ketua

: Kepala Bappeda Provinsi Lampung

II. Wakil Ketua

: Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung

III. Sekretaris

: Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Lampung

IV. Sekretariat

1. Administrator

: a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung

b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung

c. Vera Zahara, SIP, MH. (Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung)

2. Anggota

: a. Awliyanti, S.Si Apt (Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung)

b. Muhammad Airlangga, SE (Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung)

c. Julian Arinaldi, SIP, MPP. (Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung)

d. Rahmiyanita Hakim, SH, MH (Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung)

e. Dian Rahmawati, SP. (Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung)

f. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Pelaksana pada Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO